

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis deskriptif akan dideskripsikan demografi responden penelitian dan variabel-variabel yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner yang dilakukan dengan memberikan secara langsung kepada responden yang berguna dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kuesioner dalam waktu kurang lebih 2 bulan dimulai tanggal 25 Juni sampai 25 September 2010.

TABEL 4.1
Analisis Pengambilan Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	131	100 %
Kuesioner yang tidak kembali	19	14,5%
Kuesioner yang kembali	112	85,5%
Kuesioner yang kembali tapi pengisian tidak komplit	11	8,3 %
Kuesioner yang kembali dan memenuhi syarat untuk dianalisis	101	77,2%

Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 131 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 112 atau 85,5%, sedangkan yang tidak kembali sebanyak 19 kuesioner atau mencapai 14,5 %. Dari 131 kuesioner yang kembali hanya 101

merupakan data yang pengisiannya tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat untuk dilakukan analisa.

A. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem akuntansi keuangan daerah	101	11	55	47,59	5,933
Pengelolaan keuangan daerah	101	8	30	25,33	3,427
Sistem pelaporan	101	14	35	27,51	3,294
Kinerja SKPD	101	18	40	27,67	4,561
Valid N (listwise)	101				

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki *mean* sebesar 47,59 dengan standar deviasi 5,933, ini berarti pemahaman akan sistem akuntansi keuangan daerah di tiap-tiap SKPD bagus karena di atas nilai rata-rata pada kuesioner sebesar 33, untuk pengelolaan keuangan daerah memiliki *mean* sebesar 25,33 dengan standar deviasi 3,427. Ini berarti pengetahuan akan pengelolaan keuangan daerah di tiap-tiap SKPD lumayan bagus karena masih di atas nilai rata-rata dari koesioner sebesar 18. Untuk sistem pelaporan memiliki *mean* 27,51 dengan standar deviasi 3,294, Ini menandakan pemahaman sistem pelaporan di tiap-tiap SKPD cukup tinggi karena masih diatas nilai rata-rata kuesioner sebesar 21, sedangkan kinerja

SKPD memiliki *mean* 27,67 dengan standar deviasi 4,561 ini juga masih cukup bagus karena masih diatas nilai rata-rata pada kuesionel sebesar 24.

Deskriptif Demografi Responden

Dalam demografi responden akan dideskripsikan mengenai karakteristik yang dimiliki oleh responden yang diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian pada bab III sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pejabat eselon tiga dan empat yaitu (Kabag, Kabid, Kasubag, Kasubid dan Kasie) yang ada di instansi (dinas, badan dan setda) yang berada di kota dan kabupaten di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4.3
Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Pria	54	53,46 %
Wanita	47	46,53%

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi responden terbesar dalam penelitian ini adalah pria yang mencapai 53,46% atau 54 orang, sedangkan wanita hanya mencapai 46,53% atau 47 orang. Dari tabel tersebut dapat dianalisis struktur organisasi pemerintah daerah masih didominasi oleh pria.

Tabel 4.4
Jabatan Responden

Jabatan	Jumlah	Presentase (%)
Kabag	6	6 %
Kabid	20	20 %
Kasubag	19	19 %
Kasubid	23	23 %
Kasie	33	32%

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dari 101 responden, 6 orang (6%) menjabat Kabag, 20 oarang (19%) menjabat Kabid, 19 orang (19%) menjabat Kasubag, 23 orang (23%) menjabat Kasubid dan 33 orang (32%) menjabat Kasie. Mengacu pada data distribusi jabatan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki jabatan Kasie atau eselon IV.

Tabel 4.5
Pendidikan responden

Pendidikan	Jumlah	Presentase %
S2	41	41%
S1	53	52 %
DIPLOMA	4	4 %
SMA	3	3 %

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dari 101 responden, 41 orang (41%) memiliki pendidikan S2, 53 orang (52%) berpendidikan S1, 4 orang (4%) berpendidikan Diploma, dan 3 orang (3%) berpendidikan SMA. Sesuai pada distribusi pendidikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang berpendidikan S1

B. Uji Kualitas Data

1. Uji Confirmatory Factor Analysis

Tabel 4.6
KMO dan Barlett's test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,785
Barlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1715,936
	df	496
	Sig.	,000

Berdasarkan dari tabel 4.6 menunjukkan nilai KMO = 0,785 dan lebih besar dari nilai standar KMO yaitu 0,50 sehingga dapat dilakukan analisis faktor. begitu juga dengan nilai *barlett test dengan Chi-squares* : 1715.936 dan signifikan pada 0.000, maka dapat disimpulkan bahwa uji analisis faktor dapat dilanjutkan.

a. Sistem akuntansi keuangan daerah

Tabel 4.7

No	Loading factor	Cut off	Keterangan
SAKD 1	0.577	0.5	Valid
SAKD 2	0.685	0.5	Valid
SAKD 3	0.650	0.5	Valid
SAKD 4	0.764	0.5	Valid
SAKD 5	0.728	0.5	Valid
SAKD 6	0.683	0.5	Valid
SAKD 7	0.656	0.5	Valid
SAKD 8	0.681	0.5	Valid
SAKD 9	0.764	0.5	Valid
SAKD 10	0.746	0.5	Valid
SAKD 11	0.724	0.5	Valid

Berdasarkan nilai *loading factor* yang disajikan dalam tabel 4.7 di atas tampak bahwa masing-masing pertanyaan yang sudah mengelompok memiliki *cut off loading factor* $> 0,5$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 1 sampai 11 yang terdapat dalam kuesioner sistem akuntansi keuangan daerah tersebut valid atau benar-benar sebagai indikator sistem akuntansi keuangan daerah.

b. Pengelolaan keuangan daerah

Tabel 4.8

No	Loading factor	Cut off	Keterangan
PKD 1	0.762	0.5	Valid
PKD 2	0.698	0.5	Valid
PKD 3	0.637	0.5	Valid
PKD 4	0.612	0.5	Valid
PKD 5	0.719	0.5	Valid
PKD 6	0.595	0.5	Valid

Berdasarkan nilai *loading factor* yang disajikan dalam tabel 4.8 di atas tampak bahwa masing-masing pertanyaan yang sudah mengelompok memiliki *cut off loading factor* $> 0,5$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 1 sampai 6 yang terdapat dalam kuesioner pengelolaan keuangan daerah tersebut valid atau benar-benar sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah.

c. Sistem pelaporan

Berdasarkan nilai *loading factor* yang disajikan dalam tabel 4.9 di bawah ini tampak bahwa masing-masing pertanyaan yang sudah mengelompok memiliki *cut off loading factor* $> 0,5$ dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa butir pertanyaan 1 sampai 7 yang terdapat dalam kuesioner sistem pelaporan tersebut valid atau benar-benar sebagai indikator sistem pelaporan.

Tabel 4.9

No	Loading factor	Cut off	Keterangan
SP 1	0.696	0.5	Valid
SP 2	0.712	0.5	Valid
SP 3	0.660	0.5	Valid
SP 4	0.665	0.5	Valid
SP 5	0,735	0.5	Valid
SP 6	0.688	0.5	Valid
SP 7	0.658	0.5	Valid

d. Kinerja SKPD

Tabel 4.10

No	Loading factor	Cut off	Keterangan
KSKPD 1	0.711	0.5	Valid
KSKPD 2	0.703	0.5	Valid
KSKPD 3	0.667	0.5	Valid
KSKPD 4	0.542	0.5	Valid
KSKPD 5	0.698	0.5	Valid
KSKPD 6	0.725	0.5	Valid
KSKPD 7	0.733	0.5	Valid
KSKPD 8	0.705	0.5	Valid

Berdasarkan nilai *loading factor* yang disajikan dalam tabel 4.10 di atas tampak bahwa masing-masing pertanyaan yang sudah mengelompok memiliki *cut off loading factor* $> 0,5$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 1 sampai 8 yang terdapat dalam kuesioner kinerja SKPD tersebut valid atau benar-benar sebagai indikator sistem kinerja SKPD.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *cronbach alpha* yang dihasilkan dari analisis faktor menguji kelengkapan terhadap konsistensi seluruh

skala yang digunakan. Suatu instrument dikatakan handal apabila memiliki *cronbach alpha* lebih dari 0.6. Nunnaly (1969) dalam Ietje (2005)

Tabel 4.11

Variabel	Cronbach alpha	kriteria	keterangan
Sistem akuntansi keuangan daerah	0.916	> 0.6	Reliabel
Pengelolaan keuangan daerah	0.861	> 0.6	Reliabel
Sistem pelaporan	0.645	> 0.6	Reliabel
Kinerja SKPD	0.880	> 0.6	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, terdapat nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel > 0.6 maka dapat disimpulkan bahwa variabel sistem akuntansi keangan daerah, pengelolaan keuangan daerah ,sistem pelaporan dan kinerja SKPD adalah reliabel.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Suatu model dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika diperoleh nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10.

Tabel 4.12
Hasil Uji Miltokolinieritas

Variabel bebas	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Sistem akuntansi keuangan daerah	0.434	2.304	Non multikolinieritas
Pengelolaan keuangan daerah	0.346	2.893	Non multikolinieritas
Sistem pelaporan	0.621	1.611	Non multikolinieritas

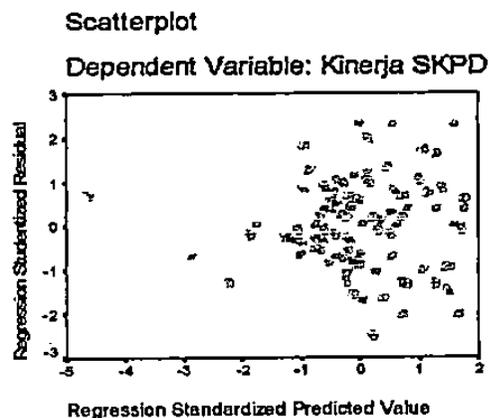
Tabel 4.13 menunjukkan bahwa hasil pengujian multikolinieritas untuk sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan VIF sebesar 2.304 berada di bawah 10 dan nilai *tolerance* sebesar 0.434 berada di atas 0.10. Pengelolaan keuangan daerah menunjukkan VIF sebesar 2.893 berada di bawah 10 dan nilai *tolerance* sebesar 0.346 berada di atas 0.10. sistem pelaporan daerah menunjukkan VIF sebesar 1.611 berada di bawah 10 dan nilai *tolerance* sebesar 0.621 berada di atas 0.10. Hal ini mengidentifikasi bahwa ketiga variabel bebas dari multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik scatterplot antar nilai prediksi variable terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID).

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3.3



Dengan melihat sebaran titik-titik yang acak baik diatas maupun dibawah angka 0 dari sumbu dependen variabel kinerja SKPD dapat disimpulkan tidak

3. Uji Normalitas

Tabel 4.12 memperlihatkan nilai *Asymp sig (2-tailed)* adalah sebesar 0,994 yang berarti lebih besar dari *alpha* ($\alpha + 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa data regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini pendekatan grafik *Normal PP of regression standardized residual*.

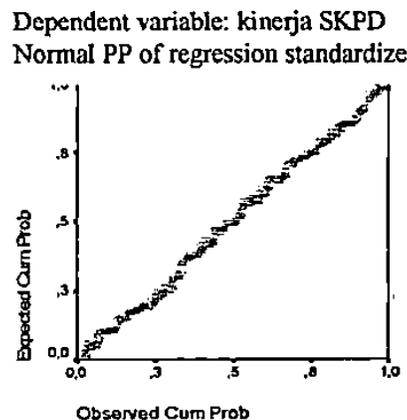
Tabel 4.13
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		101
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,03489316
Most Extreme Differences	Absolute	,042
	Positive	,042
	Negative	-,041
Kolmogorov-Smirnov Z		,421
Asymp. Sig. (2-tailed)		,994

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Gambar 3.2



Gambar 4.1 menunjukkan bahwa grafik *Normal PP of regression standardize* menggambarkan penyebaran data disekitas garis diagonal dan ...

normalitas dapat disimpulkan data bedistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas.

D. Pengujian Hipotesis dan Analisis Data

1. Uji Signifikasi Nilai F

Tabel 4.15
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	452,182	3	150,727	8,980	,000(a)
	Residual	1628,036	97	16,784		
	Total	2080,218	100			

a Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

b Dependent Variable: Kinerja SKPD

Hasil perhitungan nilai F Tabel 4.15 menunjukan nilai F sebesar 8,980 dengan nilai signifikasi sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$, berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Signifikansi Nilai t

Tabel 4.14
Uji t statistik
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,415	3,939		2,644	,010
	Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	-,071	,105	-,093	-,680	,498
	Pengelolaan Keuangan Daerah	,477	,203	,359	2,348	,021
	Sistem Pelaporan	,311	,158	,225	1,971	,052

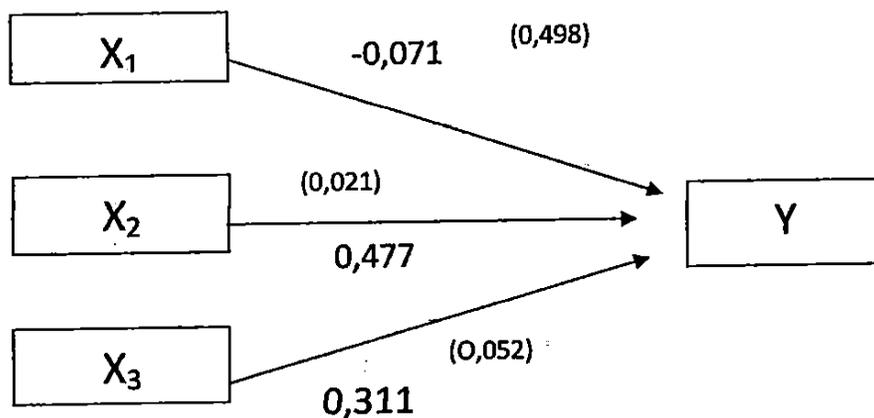
Konstanta

$$Y = a_1 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = -0,071X_1 + 0,477X_2 + 0,311X_3$$

Hipotesis pertama, nilai t hitung untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah adalah -0.680 dengan koefisien beta -0.071 dan nilai sig 0,498 > alpha 0,05 sehingga hipotesis pertama ditolak. Sedangkan Hipotesis kedua, nilai t hitung pengelolaan keuangan daerah adalah 2,348 dengan nilai koefisien beta 0,477 dan nilai sig 0,021 < alpha 0,05 sehingga hipotesis kedua diterima. Hipotesis ketiga, nilai t hitung untuk variabel sistem pelaporan adalah 1,971 dengan koefisien beta 0,311 dan nilai sig 0,052 > alpha 0,05 sehingga hipotesis pertama ditolak.

Adapun Output struktur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.3
Pengaruh sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah dan sistem pelaporan terhadap kinerja SKPD

Keterangan :

X₁ : Sitem akuntansi keuangan daerah

X₂ : pengelolaan keuangan daerah

X₃ : Sistem Pelaporan.

Y : Kinerja SKPD.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 4.15
Uji Adjuted R Square
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,466(a)	,217	,193	4,097

a Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

b Dependent Variable: Kinerja SKPD

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa besarnya *Adjusted R Square* sebesar 0.193, hal ini berarti 19,3 % variabel Kinerja SKPD yang dapat dijelaskan oleh variabel sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keungan daerah dan sistem pelaporan, sedangkan sisanya 80,7 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang tidak diteliti

E. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan nilai *coefficients beta* -0,071 dan nilai sig 0,498 > α 0,05 ini berarti tidak dapat mendukung H₁. Bahwa menurut persepsi responden instansi pemerintahan di kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah tidak

Penulis mendapatkan informasi dari hasil wawancara langsung dengan salah satu pegawai atau aparatur pemerintahan dan masyarakat. Informasi yang penulis peroleh dapat disimpulkan, bahwa walau rata-rata pendidikan pegawai instansi di tiap-tiap SKPD sudah banyak yang lulusan S1 dan sudah mengenal tentang sistem akuntansi keuangan daerah namun karena sistem budaya organisasi yang buruk di lingkungan SKPD dan hal tersebut masih terus dilakukan, itu yang lebih mempunyai pengaruh terhadap perilaku kinerja SKPD sehingga dalam tanggung jawab mengemban tugas juga tidak dilakukan secara maksimal sesuai yang diharapkan masyarakat. Budaya organisasi tersebut adalah etos kerja yang rendah, yang disebabkan antara lain perekrutan pegawai tidak berdasarkan jurusan atau bidangnya, senioritas yang tidak mendidik sehingga di setiap tingkatan baik eksekutif maupun legislatif mudah ditemui gejala atau kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehingga dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah malah dijadikan ancaman atau penghalang untuk membudayakan sistem organisasi tersebut dan bukan digunakan sebagai alat bantu tugas mereka. Hasil penelitian ini tidak konsisten atau tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tuasikal (2007) yang menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan nilai *coefficients beta* 0.477 dan nilai sig $0,021 < \alpha 0,05$ ini berarti H_2 dapat didukung. Bahwa secara parsial pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja

kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta bila pengelolaan keuangan dapat dikelola sesuai dengan peraturan dan sistem yang ada maka akan meningkatkan kinerja satuan SKPD. Semua tugas pemerintah akan terlaksana karena pada dasarnya tugas pemerintah yang paling mendasar adalah melayani rakyat. Pelayanan tersebut bisa berupa jasa ataupun logistik sebagai contoh pendidikan, kesehatan, perlindungan, lapangan kerja dan masih banyak yang lain.

Dana pemerintah yang bersumber dari APBD atau APBD bisa dialokasikan untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal sehingga akan memberikan gambaran atau penilai yang baik dari masyarakat, karena masyarakat dalam memperoleh pelayanan sudah tidak harus mengeluarkan biaya yang tidak jelas lagi. Semua dana sosial dan kemasyarakatan sudah dianggarkan dalam rancangan APBD ataupun APBN, dan pada dasarnya pengelolaan keuangan harus dimulai dari tahap penyusunan anggaran, penetapan dan sampai pelaksanaan. Hasil penelitian ini konsisten dan sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tuasikal (2007) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan nilai coefficients beta 0,311 dan nilai sig 0,052 > α 0,05 ini berarti H_3 tidak dapat didukung. Bahwa sesungguhnya bila laporan yang buat sudah sesuai dengan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan oleh SAP dan sistem pelaporanya dilakukan dengan

atau kepala daerah untuk pengambilan keputusan, namun hal tersebut tidak dapat didukung berdasarkan dengan pengujian yang sudah penulis dilakukan.

Menurut instansi pemerintah di kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Faktor penyebab kenapa sistem pelaporan tidak berpengaruh positif tersebut masing sering dipertanyakan. Hal ini mengidentifikasi bahwa laporan yang harusnya dibuat dengan jujur, objektif, transparan, relevan, tepat waktu belum dapat menjamin kinerja tiap-tiap instansi di SKPD akan meningkat dan baik. Menurut mereka kinerja instansi pemerintah daerah tidak akan baik walau pemahaman akan sistem pelaporan mereka baik, karena semua tergantung individu dan lingkungan kerja di tiap-tiap satuan kerja. Bahkan laporan yang semestinya digunakan untuk pengambilan keputusan dirasa tidak terlalu bermanfaat dalam menyusun anggaran baru terkadang menggunakan anggaran yang besar walau nantinya juga akan terpotong-potong sesuai kebutuhan program atau rencana anggaran.

Hasil penelitian ini tidak konsisten atau tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andy Tuty (2008) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja SKPD. Namun hasil pengujian ini sesuai dan konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Wulan (2009) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh positif